



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895
e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id
BANDAR LAMPUNG - 35132

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700 /563/KPTS/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/04.a/VI.04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG**

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta relasi, Peta sub Proses, serta Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun berdasarkan hubungan kjerja antar bidang pada Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan fungsi, untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Lampung.

KETIGA : Peta Proses bisnis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat Provinsi Lampung dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efesien.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2022

INSPEKTUR,



Ir. FREDY, S.M.M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202199010 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Lampung di Teluk betung { sebagai Laporan };
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung;



PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

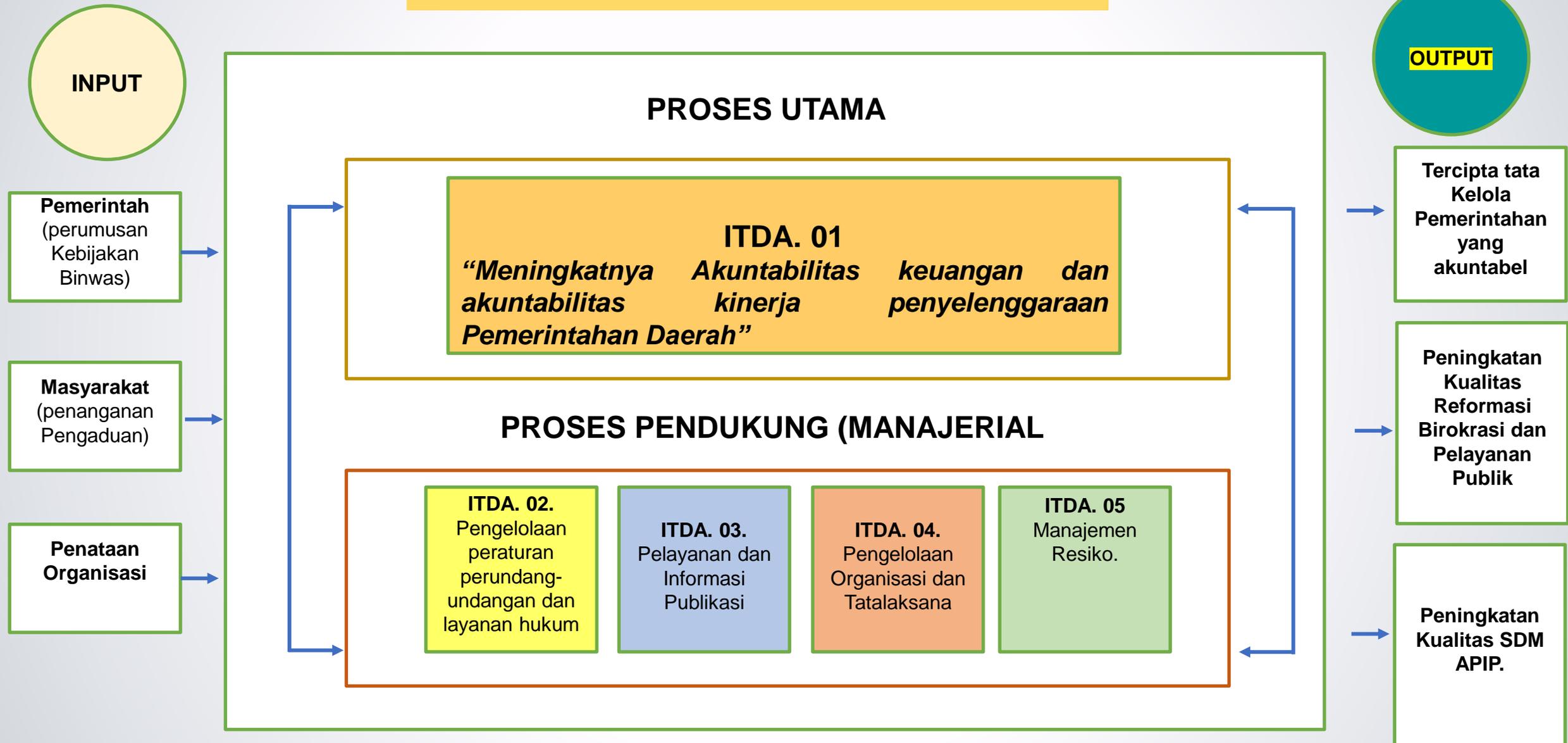




PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

PROSES BISNIS LEVEL 0

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG





**PETA SUB PROSES BISNIS
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

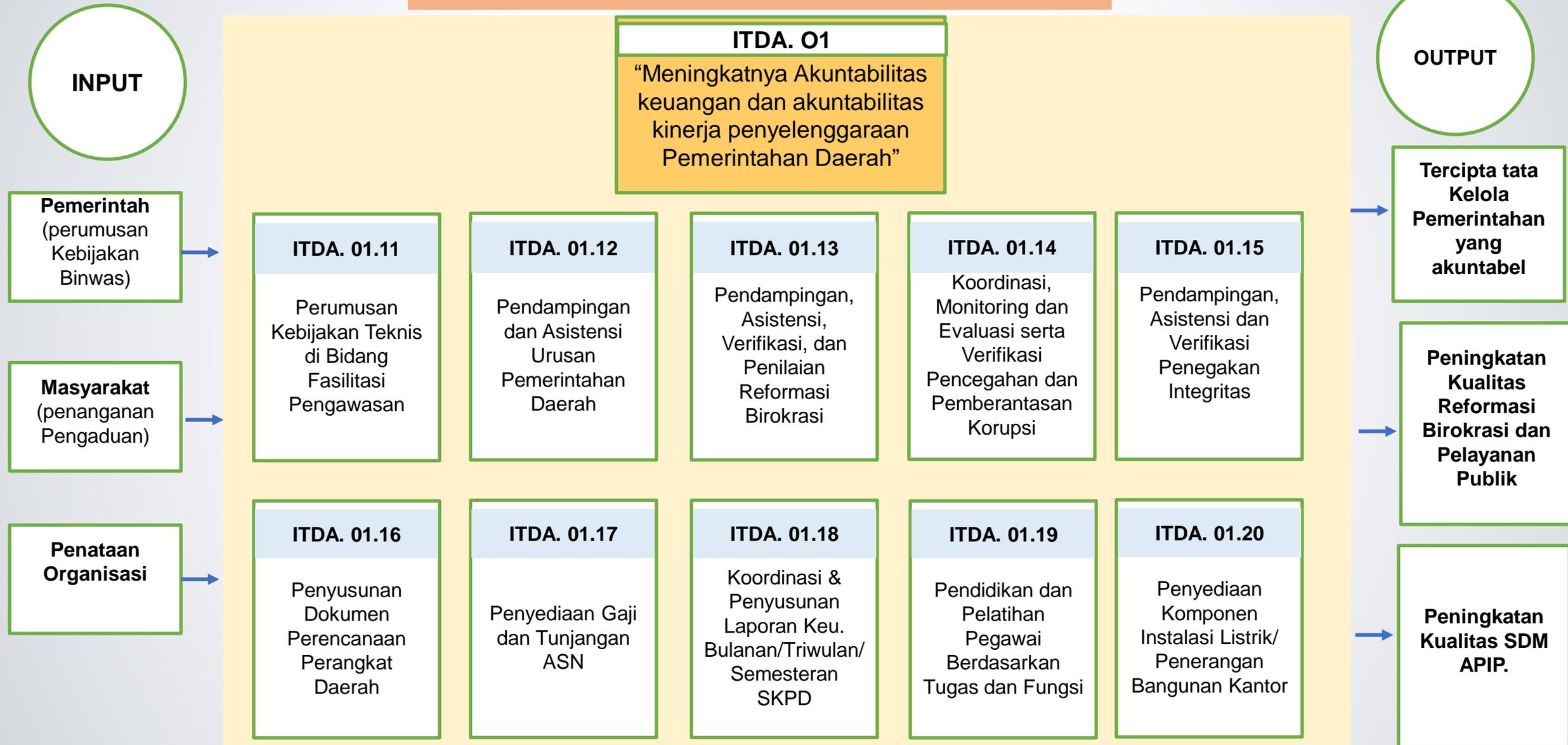
PROSES BISNIS LEVEL 1

PETA SUB PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



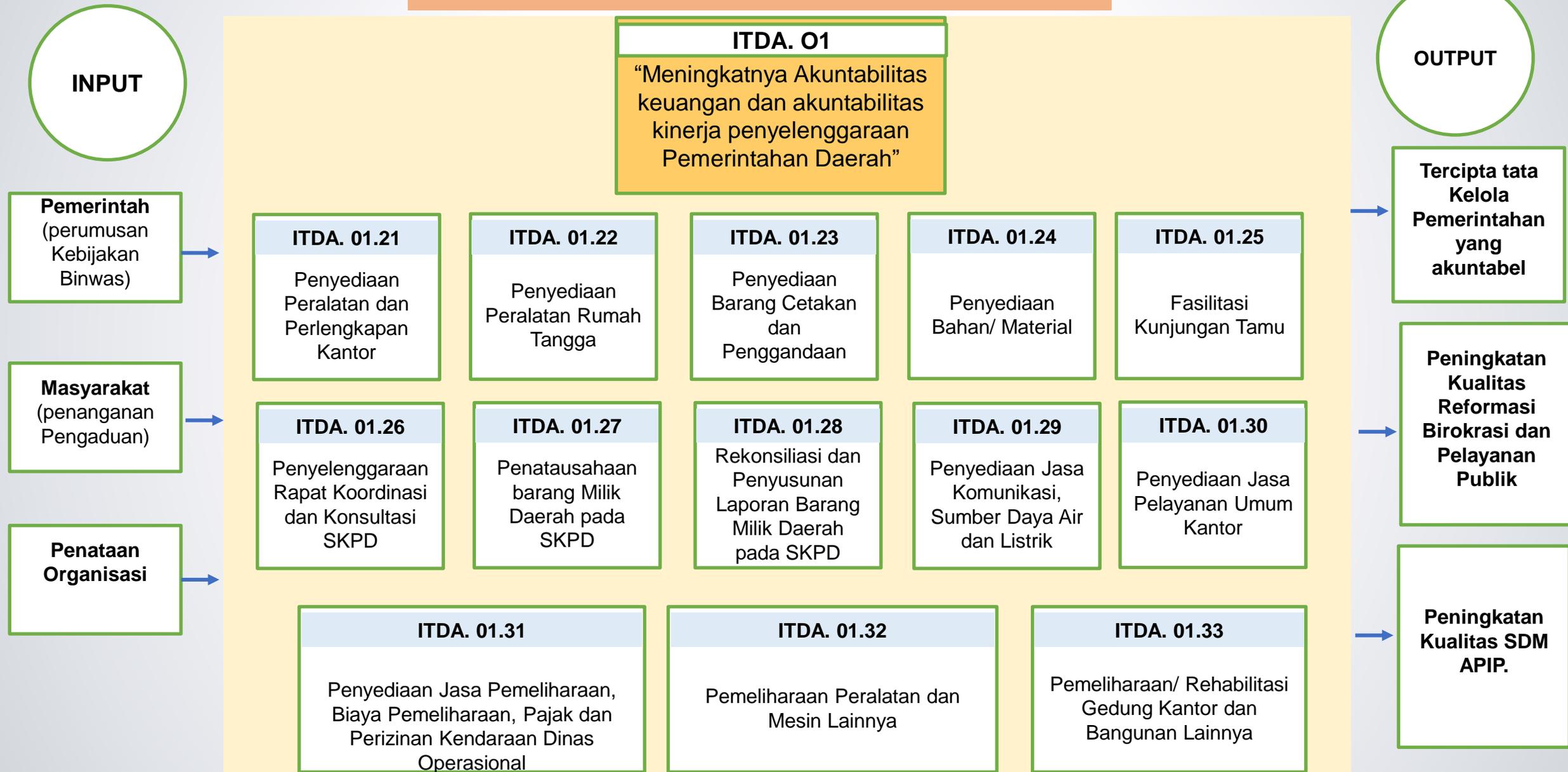
PROSES BISNIS LEVEL 1

PETA SUB PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



PROSES BISNIS LEVEL 1

PETA SUB PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



PETA RELASI INSPEKTORAT

ITDA. 01.01

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- 1) Gubernur Lampung.
- 2) Perangkat Daerah.
- 3) Kemenpan-RB.
- 4) Kemendagri.
- 5) BPK
- 6) BPKP.
- 7) KPK

ITDA. 01.02

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Gubernur Lampung.
- 2) Perangkat Daerah.
- 3) Kemenpan-RB.
- 4) Kemendagri.
- 5) BPK
- 6) BPKP.
- 7) KPK

ITDA. 01.03

Reviu Laporan Kinerja :

- 1) Gubernur Lampung.
- 2) Perangkat Daerah.
- 3) Kemendagri.
- 4) BPK
- 5) BPKP.

ITDA. 01.04

Reviu Laporan Keuangan :

- 1) Gubernur Lampung.
- 2) Perangkat Daerah.
- 3) Kemendagri.
- 4) BPK
- 5) BPKP.

ITDA. 01.05

Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota

- 1) Gubernur Lampung.
- 2) Bupati/Walikota.
- 3) Kemendagri.

ITDA. 01.06

Kerjasama Pengawasan Internal :

- 1) Gubernur Lampung.
- 2) Kemenko POLHUKAM
- 3) Polda Lampung.
- 4) Kejaksaan.
- 5) Pengadilan Tinggi.
- 6) TNI
- 7) Perangkat Daerah.

ITDA. 01.07

Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP :

1. Kemedagri.
2. BPK
3. BPKP
4. PERANGKAT daerah

ITDA. 01.08

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah :

- 1) Gubernur.
- 2) BPK.
- 3) BPKP
- 4) Perangkat Daerah.

ITDA. 01.09

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu :

- 1) Gubernur
- 2) Perangkat Daerah.
- 3) Masyarakat.
- 4) APH.

ITDA. 01.10

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan :

- 1) Kemendagri
- 2) BPKP
- 3) Perangkat Daerah.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota.

PETA RELASI INSPEKTORAT

ITDA. 01.11

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan :

- 1) Gubernur.
- 2) Perangkat daerah.
- 3) Pemkab/Pemkot

ITDA. 01.12

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah :

1. Kemepan.
2. BPKP
3. Perangkat daerah.
4. Pemkab/Pemkot.

ITDA. 01.13

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi :

1. KEMENPAN-RB.
2. Perangkat Daerah.

ITDA. 01.14

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi :

1. KPK-RI
2. Perangkat Daerah.
3. Pemkab/Pemkot.
4. POLDA.

ITDA. 01.15

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas :

- 1) Kemenpan RB.
- 2) KPK-RI.
- 3) Perangkat Daerah.

ITDA. 01.16

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :

- 1) Bappeda.
- 2) Perangkat Daerah.

ITDA. 01.17

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :

1. BPKAD.
2. Perangkat Daerah,

ITDA. 01.18

Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD :

1. BAPPEDA
2. BIRO ADBANG

ITDA. 01.19

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi :

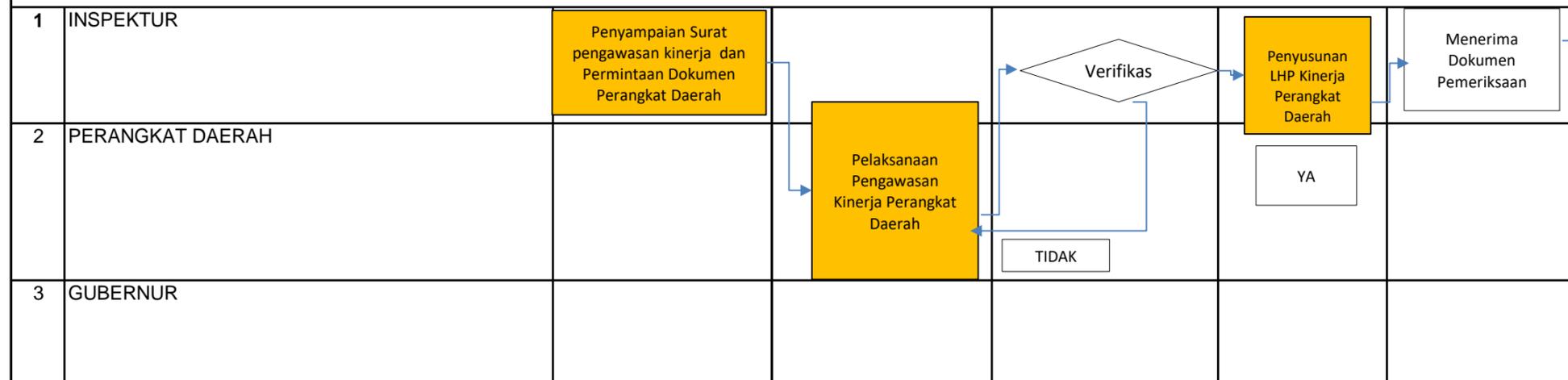
1. Badan Diklat.
2. BPKP.
3. KEMENDAGRI.
4. BPSDM

ITDA. 01.20

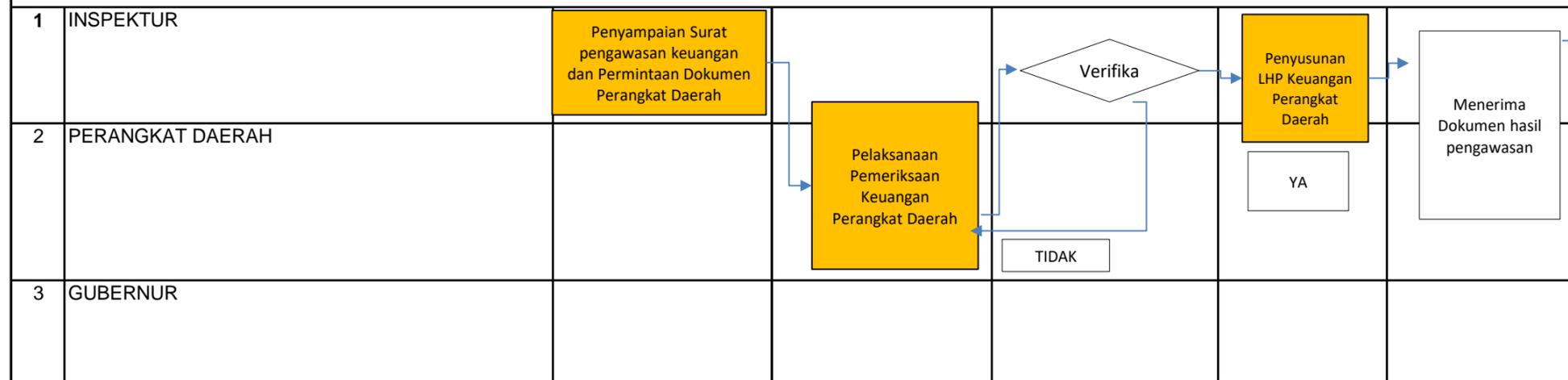
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :

1. BPKAD.
2. Dunia Usaha.

ITDA : 01.01



ITDA : 01.02



REVIU LAPORAN KINERJA

ITDA : 01.03

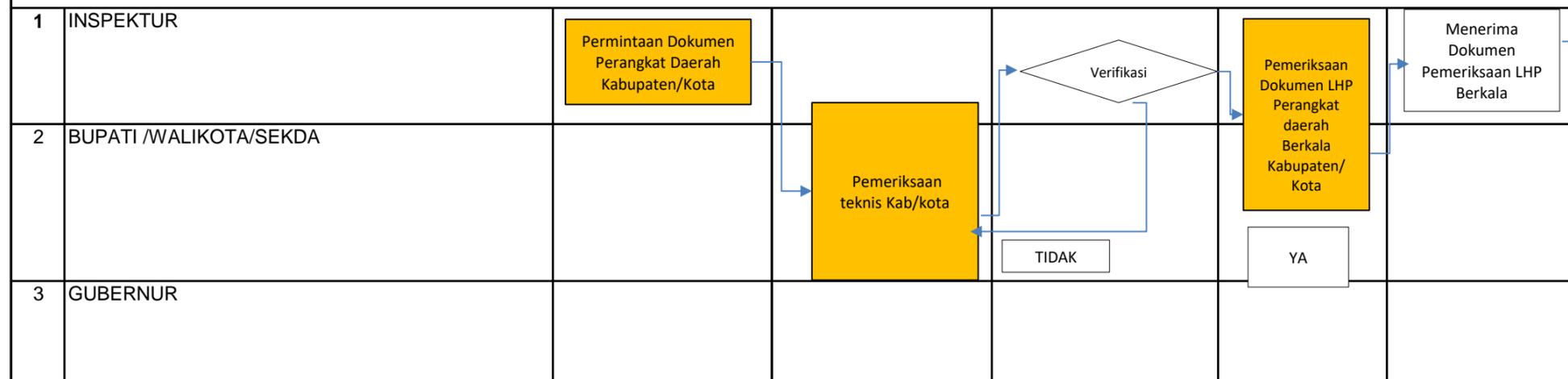
1	INSPEKTUR	Penyampaian Pelaksanaan Reviu			
3	PERANGKAT DAERAH		Rapat dan Pelaksanaan Reviu Kinerja	Verifikasi	Penyusunan Lapora HASIL REVIU
4	GUBERNUR			TIDAK	YA
5	KEMENDAGRI				
6	BPK				
7	BPKP				

REVIU LAPORAN KEUANGAN

ITDA : 01.04

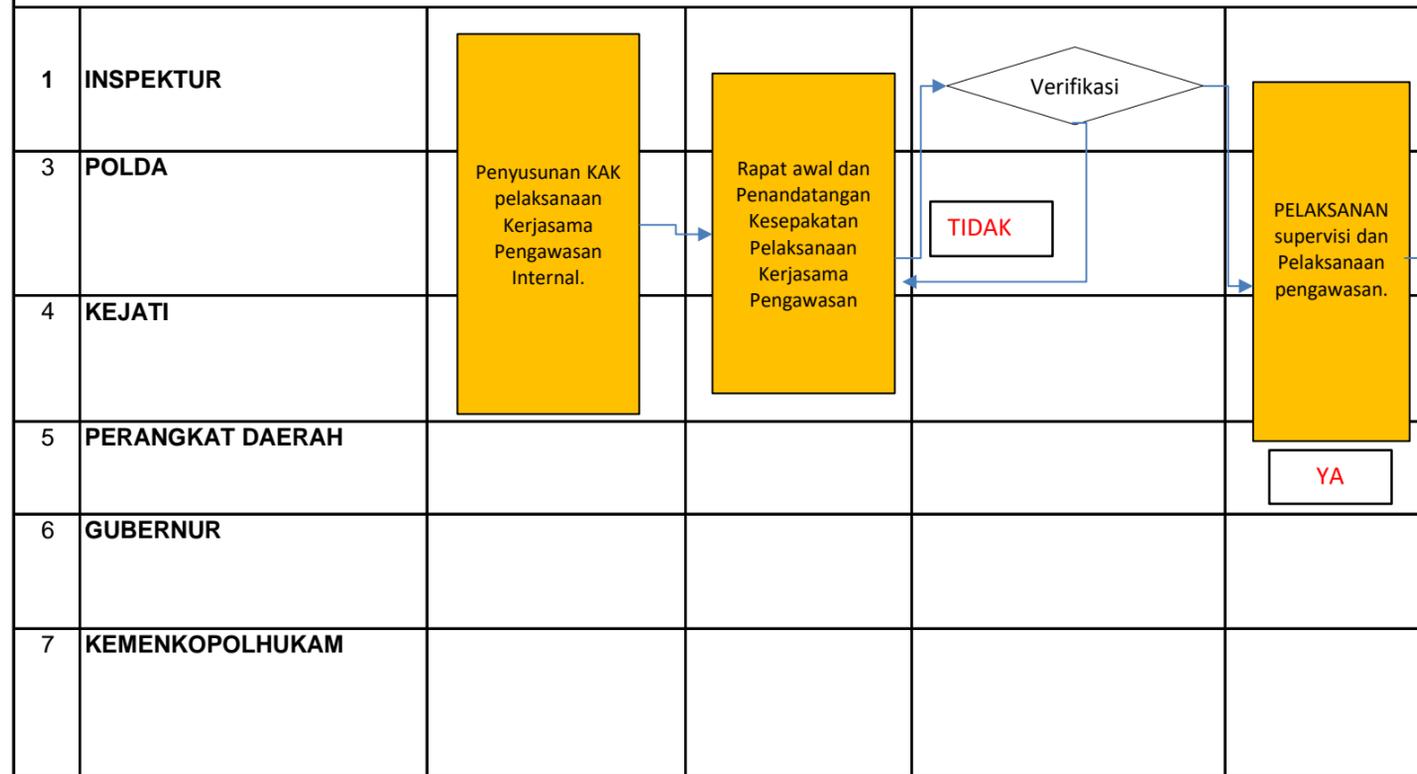
1	INSPEKTUR	Penyampaian Pelaksanaan Reviu			
3	PERANGKAT DAERAH		Rapat awal dan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Verifikasi	Penyusunan Lapora HASIL REVIU
4	GUBERNUR			TIDAK	YA
5	KEMENDAGRI				
6	BPK				
7	BPKP				

ITDA : 01.05



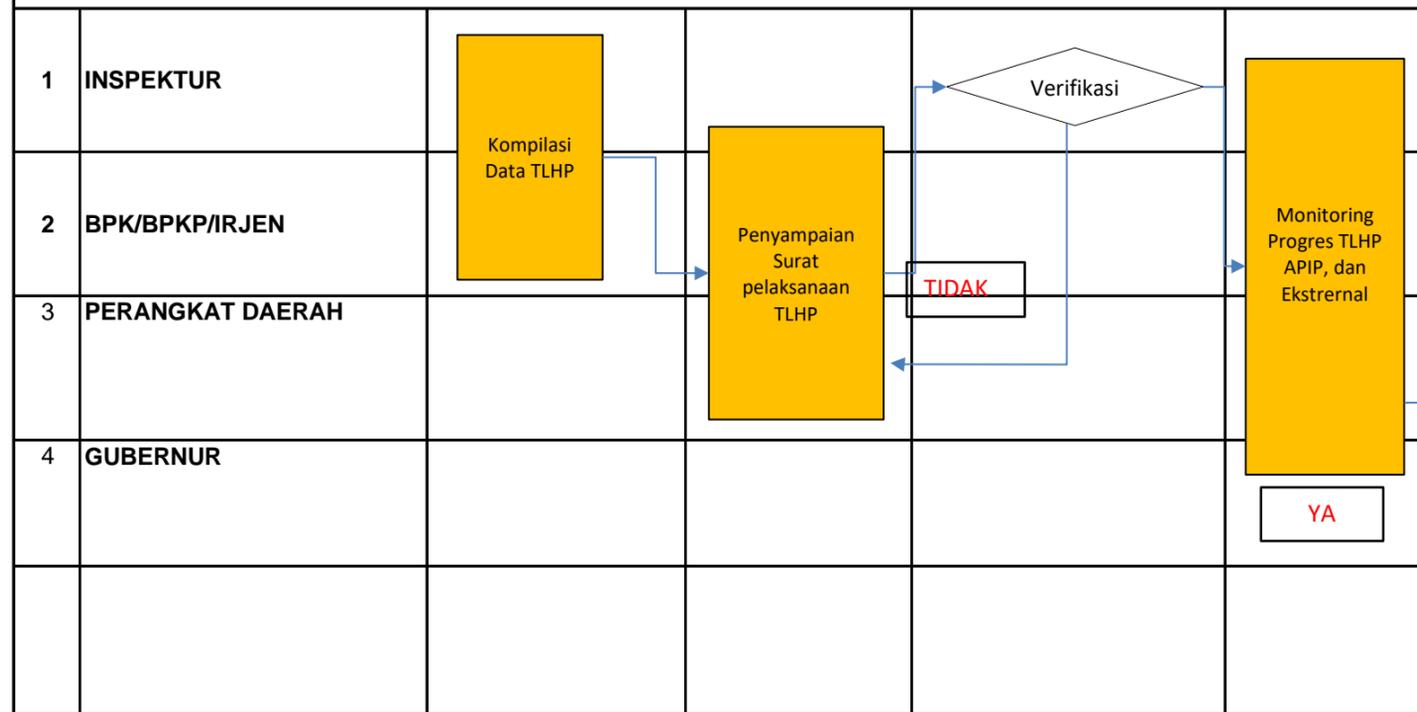
Kerjasama Pengawasan Internal

ITDA : 01.06



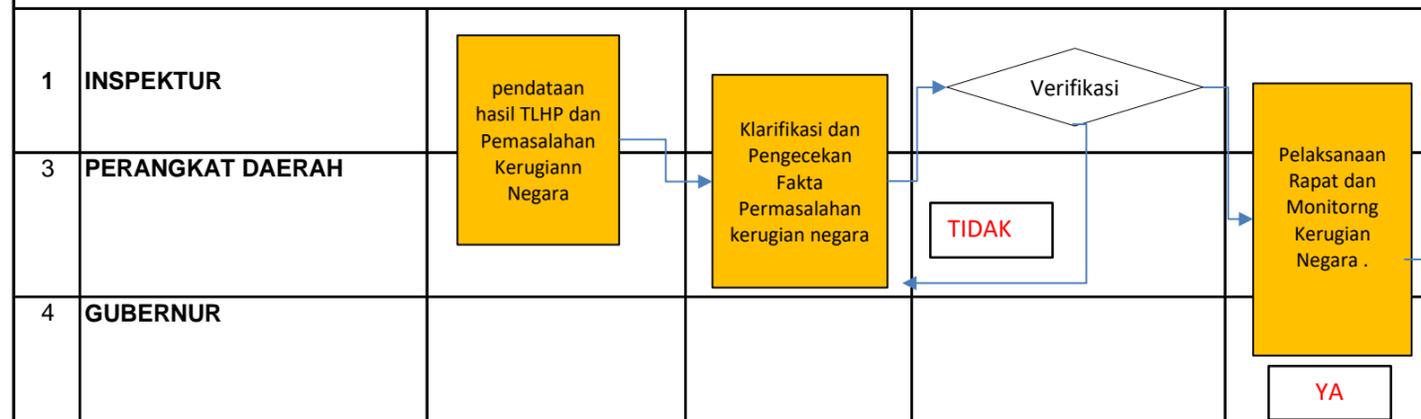
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

ITDA : 01.11



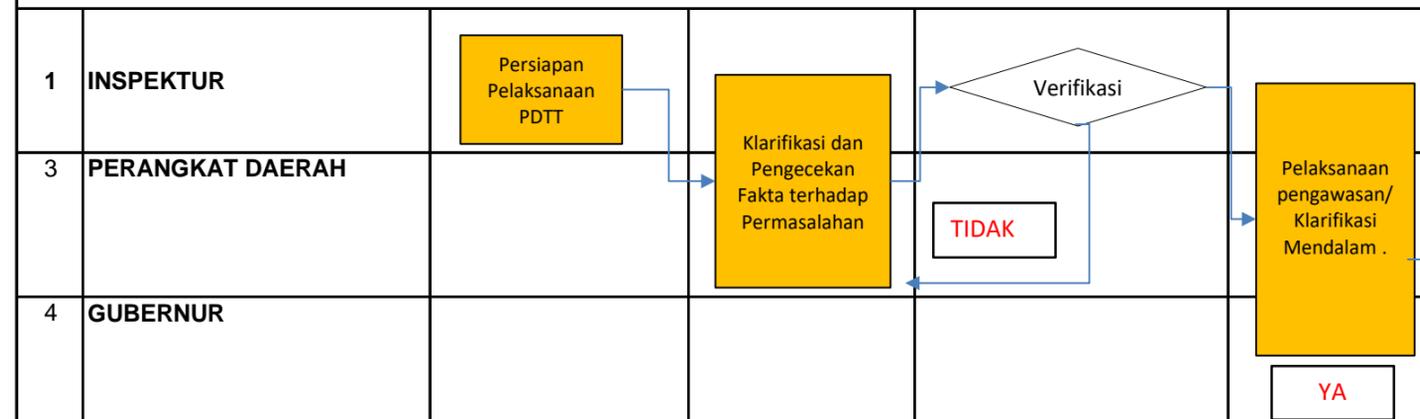
Pengawasan dengan tujuan Tertentu

ITDA : 01.09



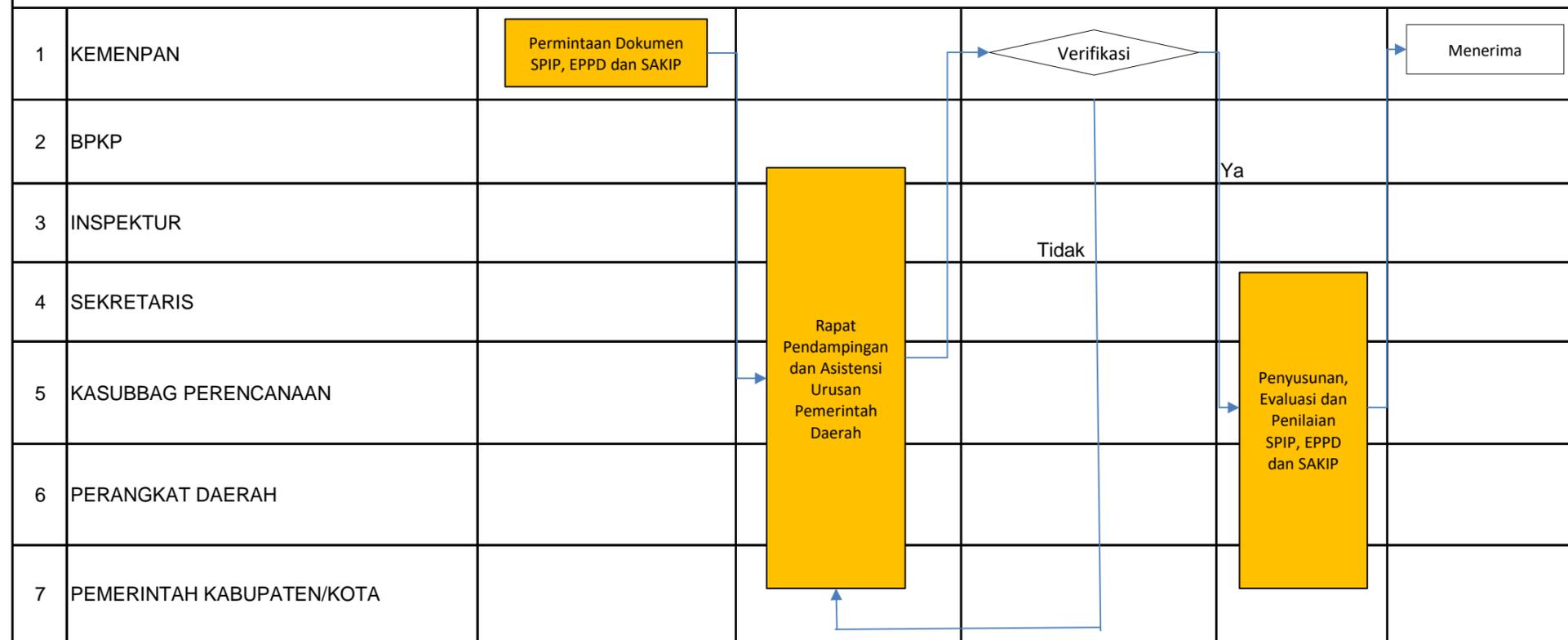
Pengawasan dengan tujuan Tertentu

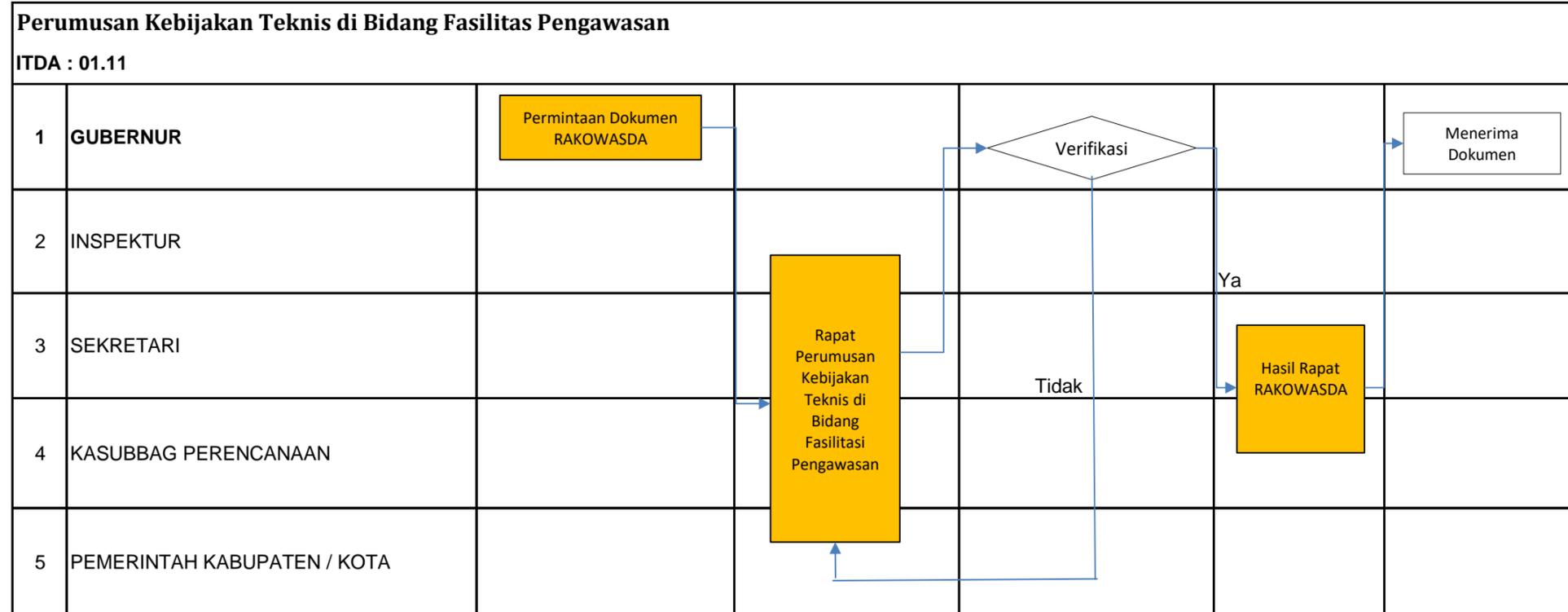
ITDA : 01.09

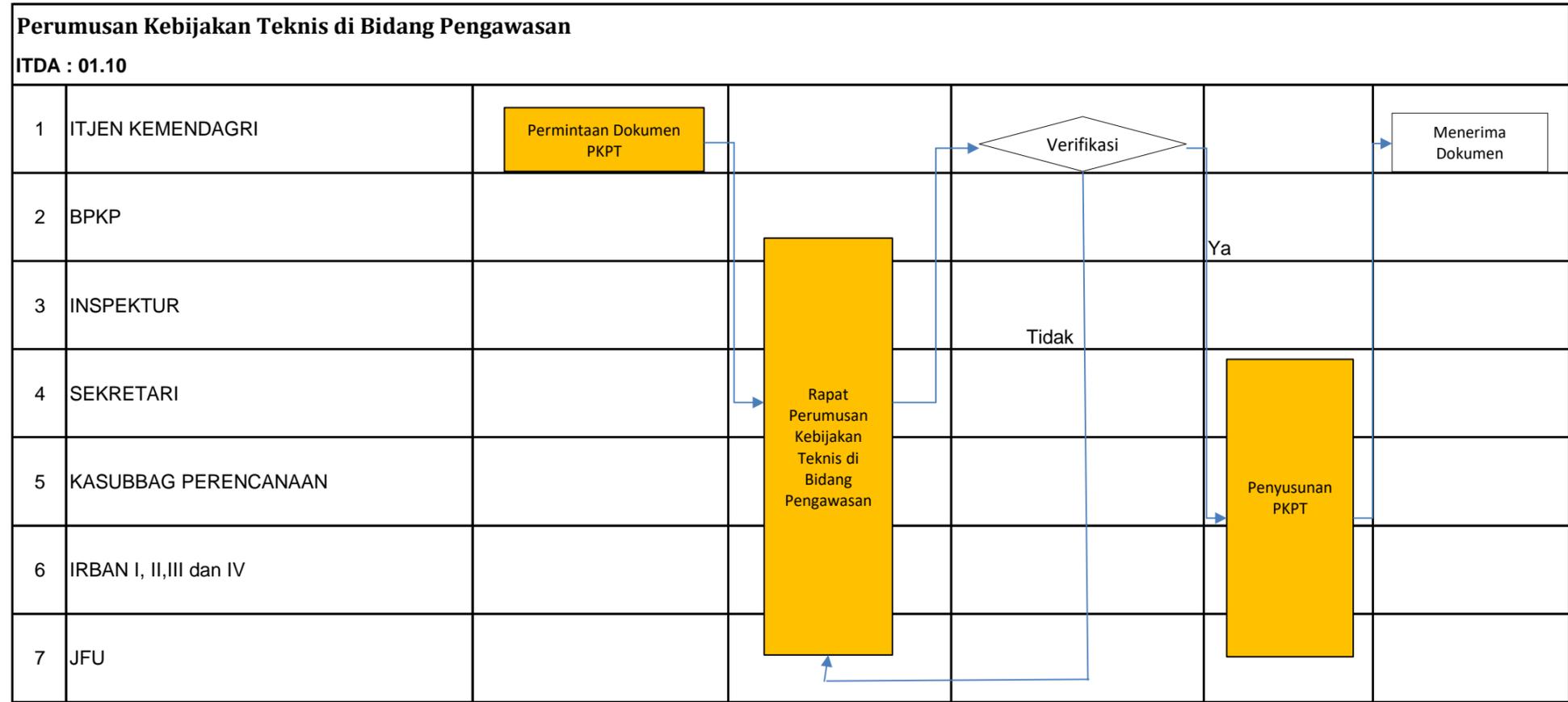


Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

ITDA : 01.12

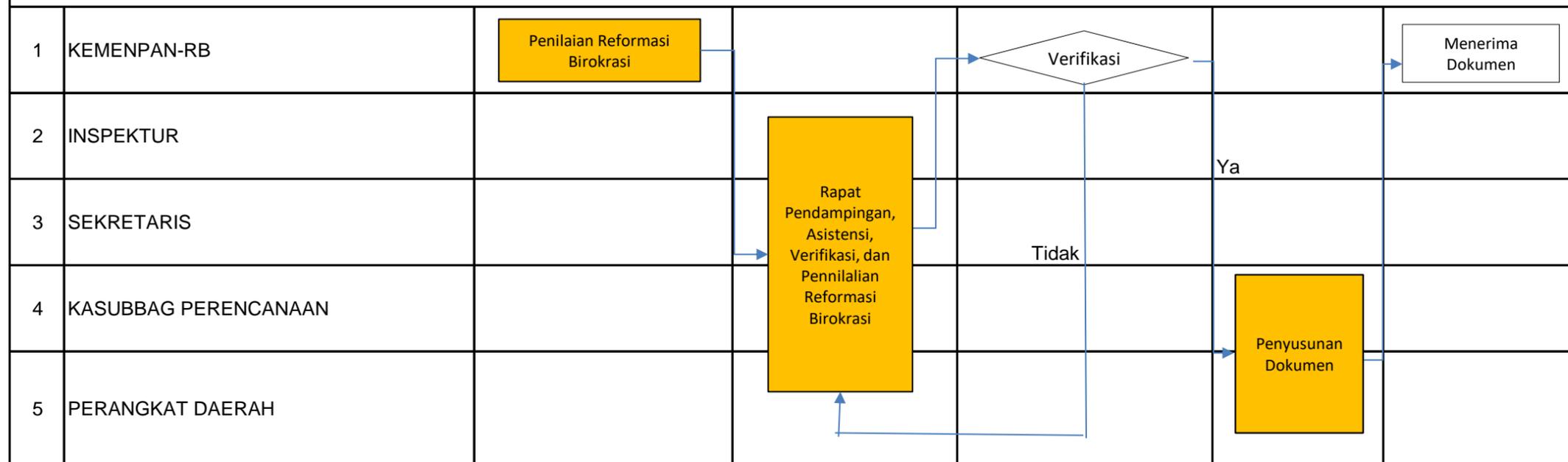






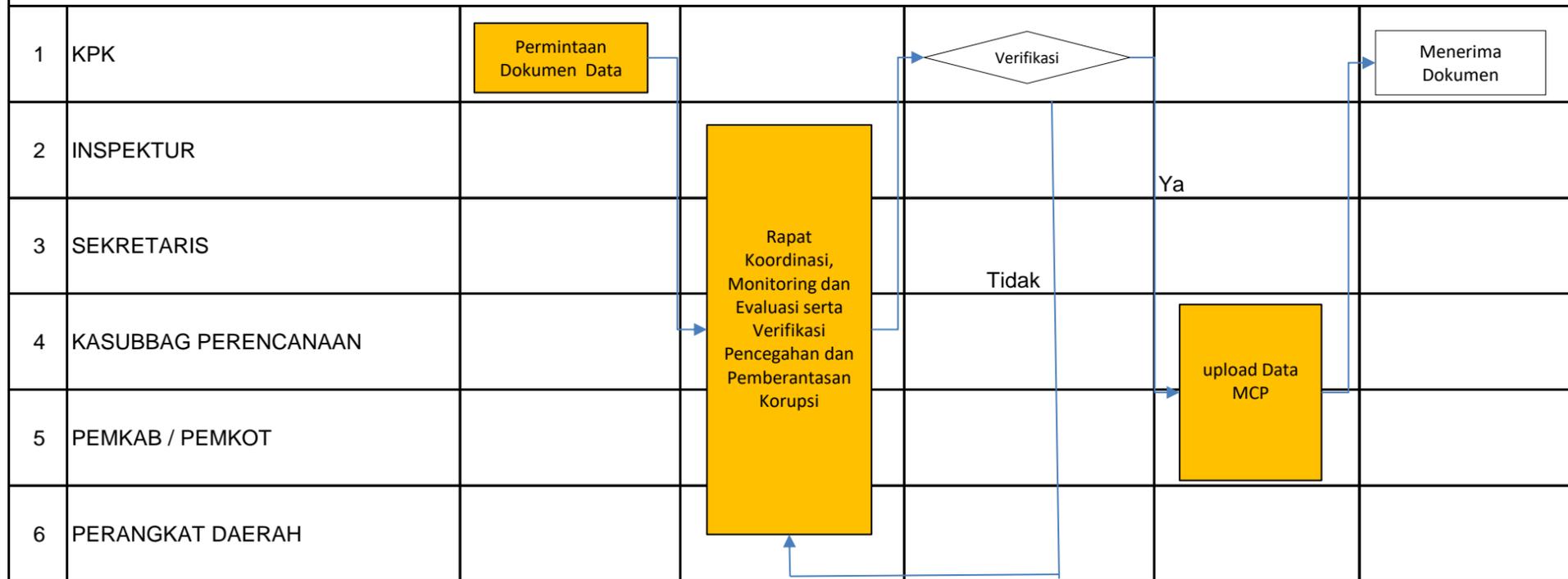
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

ITDA : 01.13



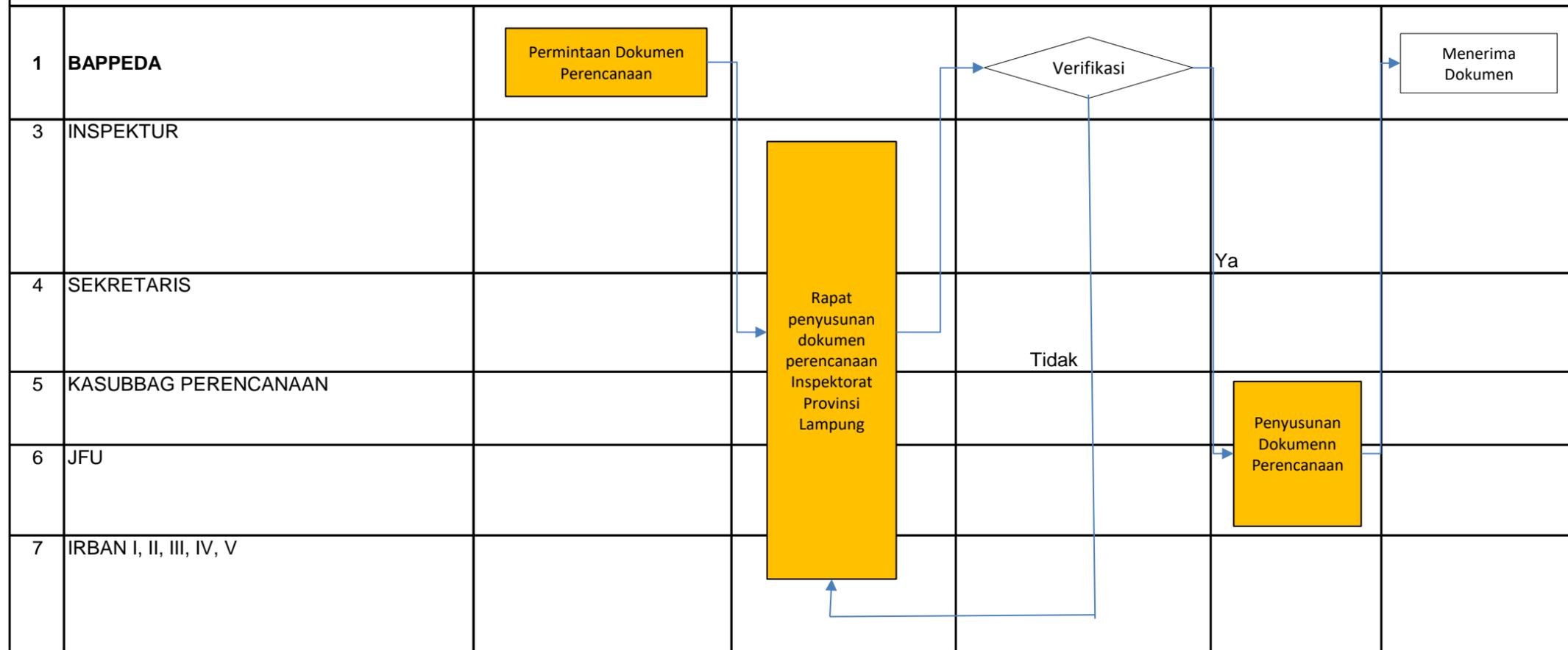
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

ITDA : 01.14



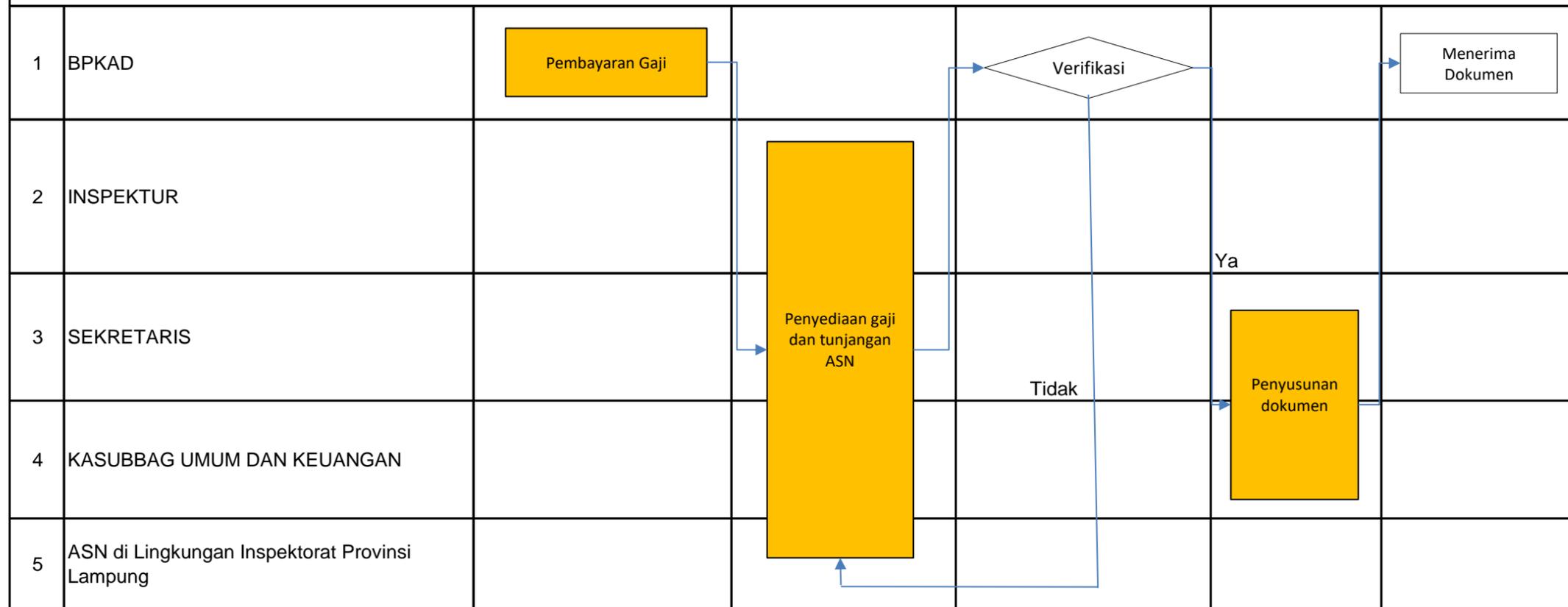
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ITDA : 01.16



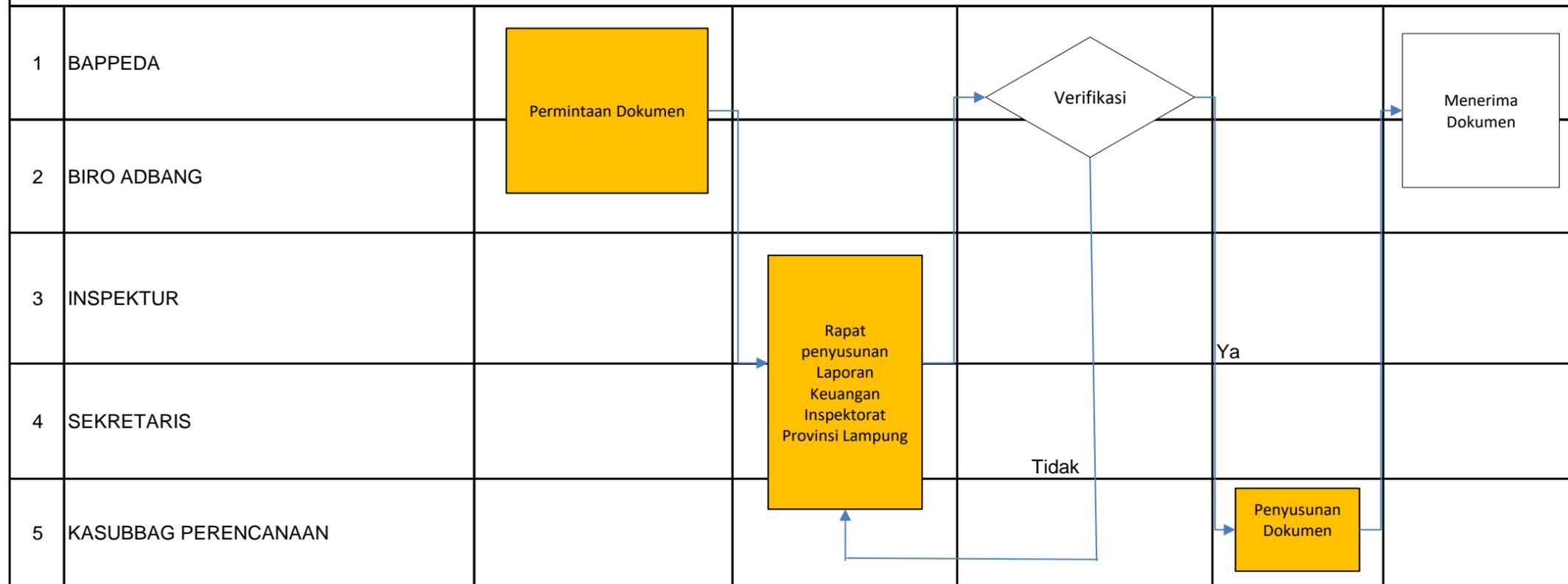
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

ITDA : 01.17



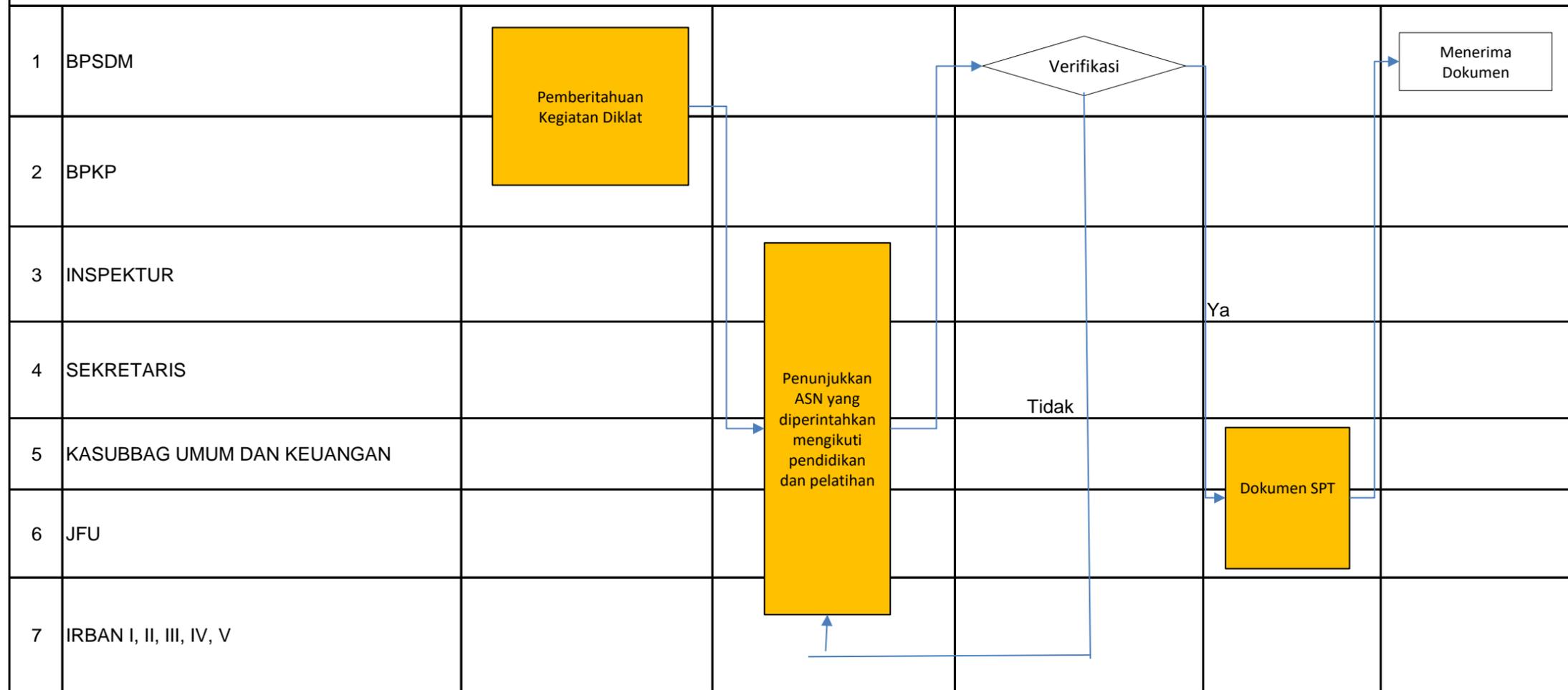
**Koordinasi &
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

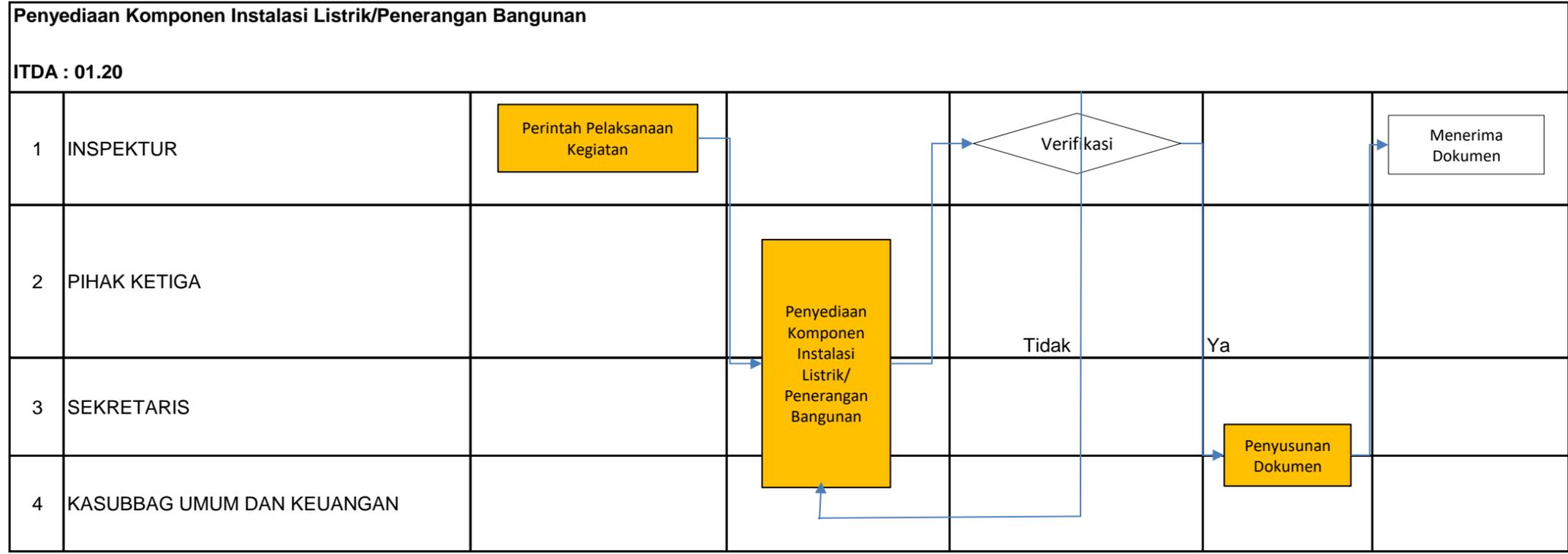
ITDA : 01.18



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

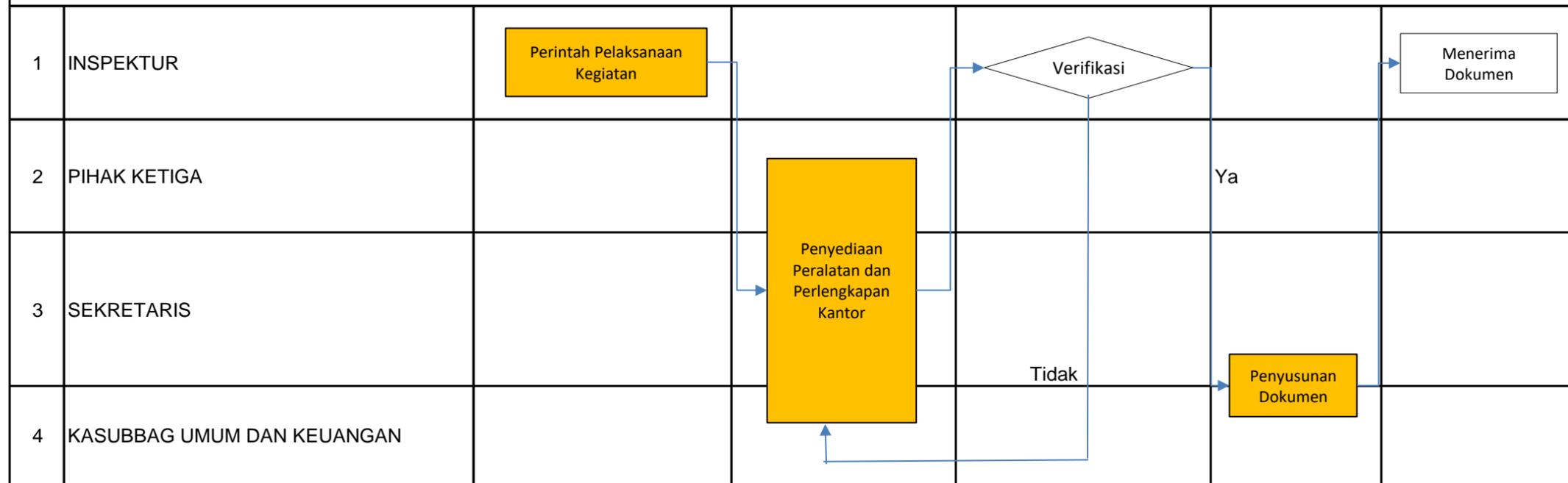
ITDA : 01.19





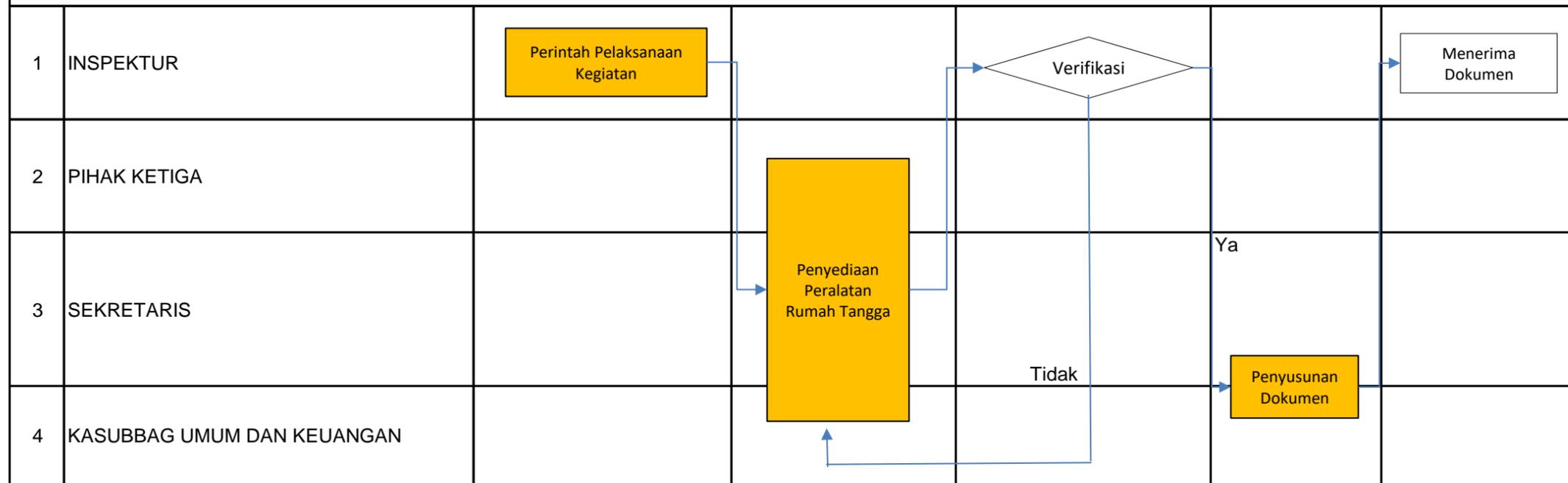
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

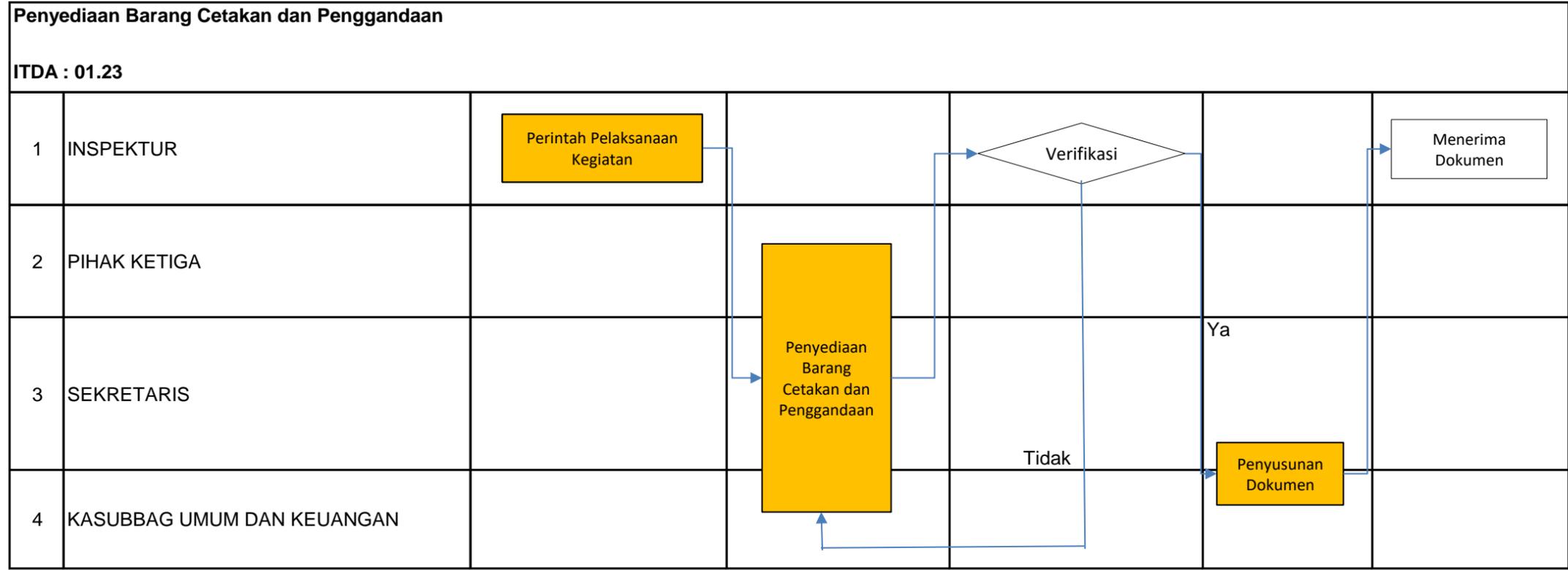
ITDA : 01.21



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

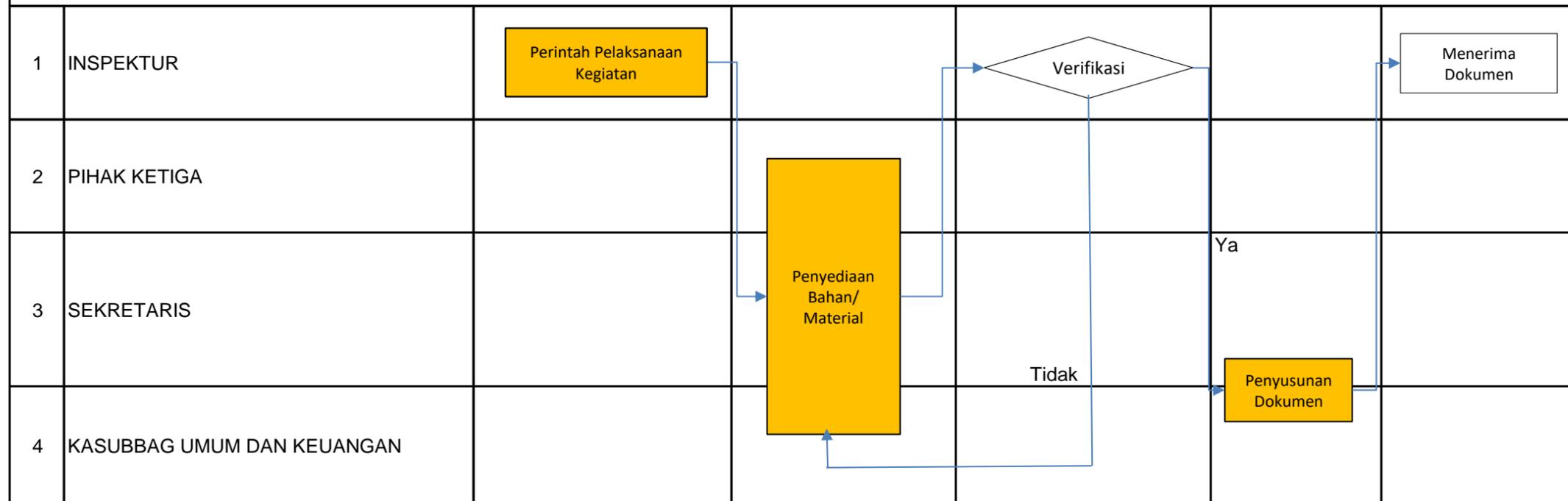
ITDA : 01.22





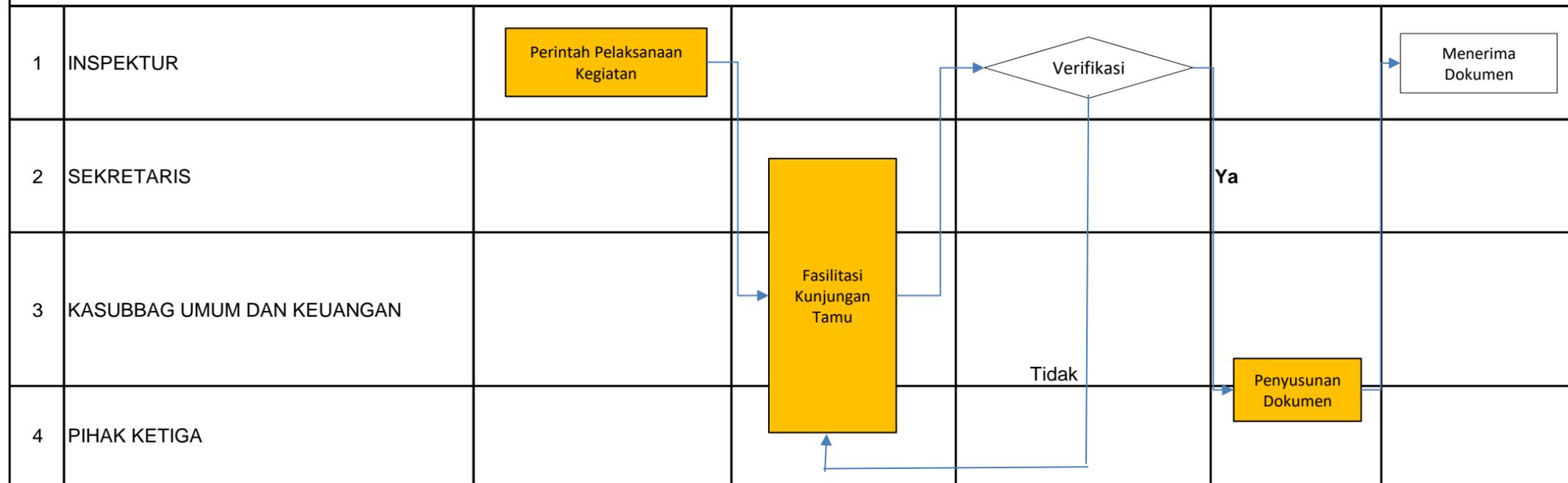
Penyediaan Bahan/ Material

ITDA : 01.24



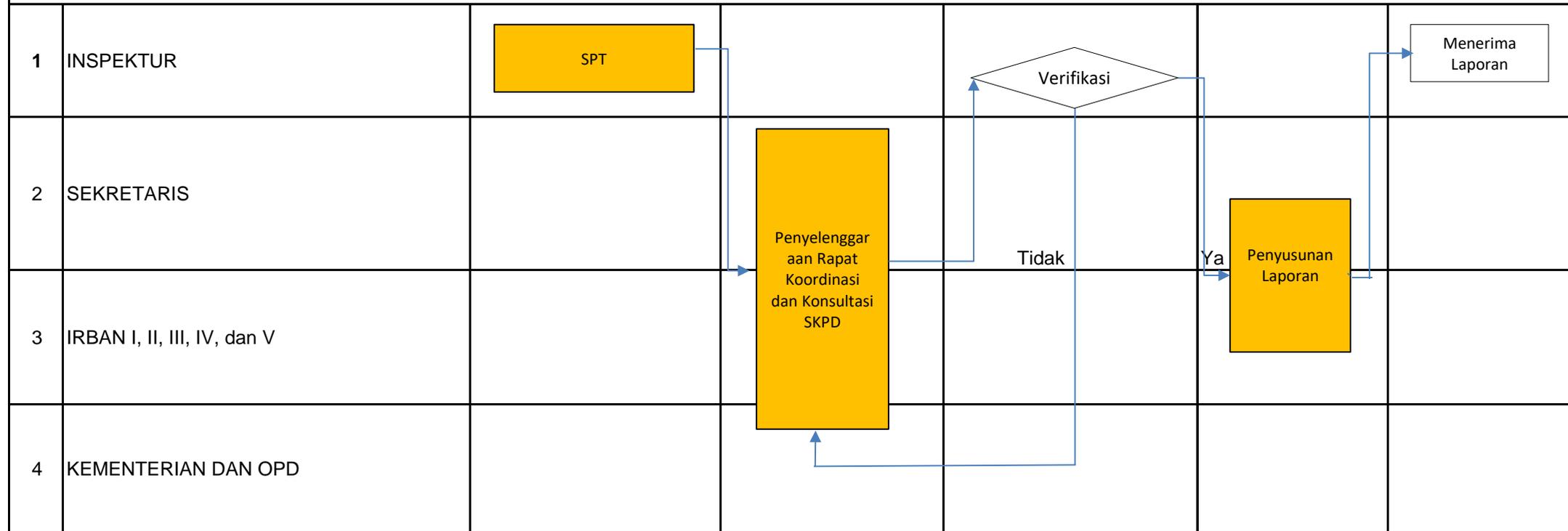
Fasilitasi Kunjungan Tamu

ITDA : 01.25



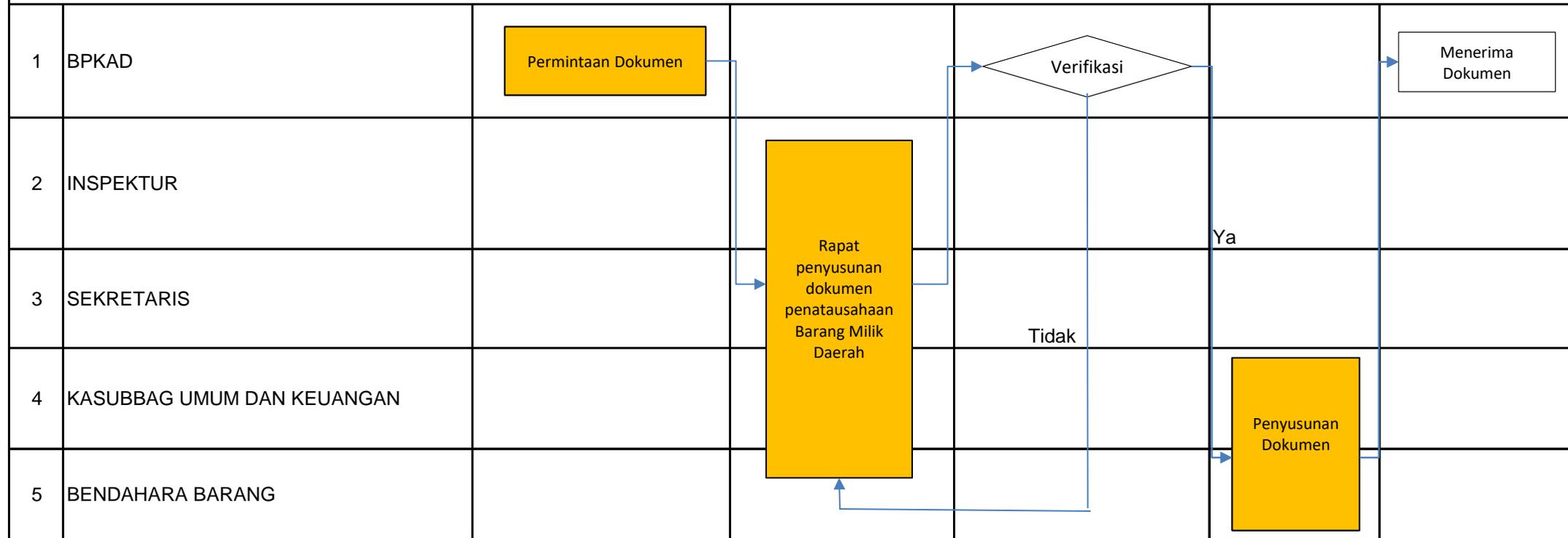
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

ITDA : 01.26



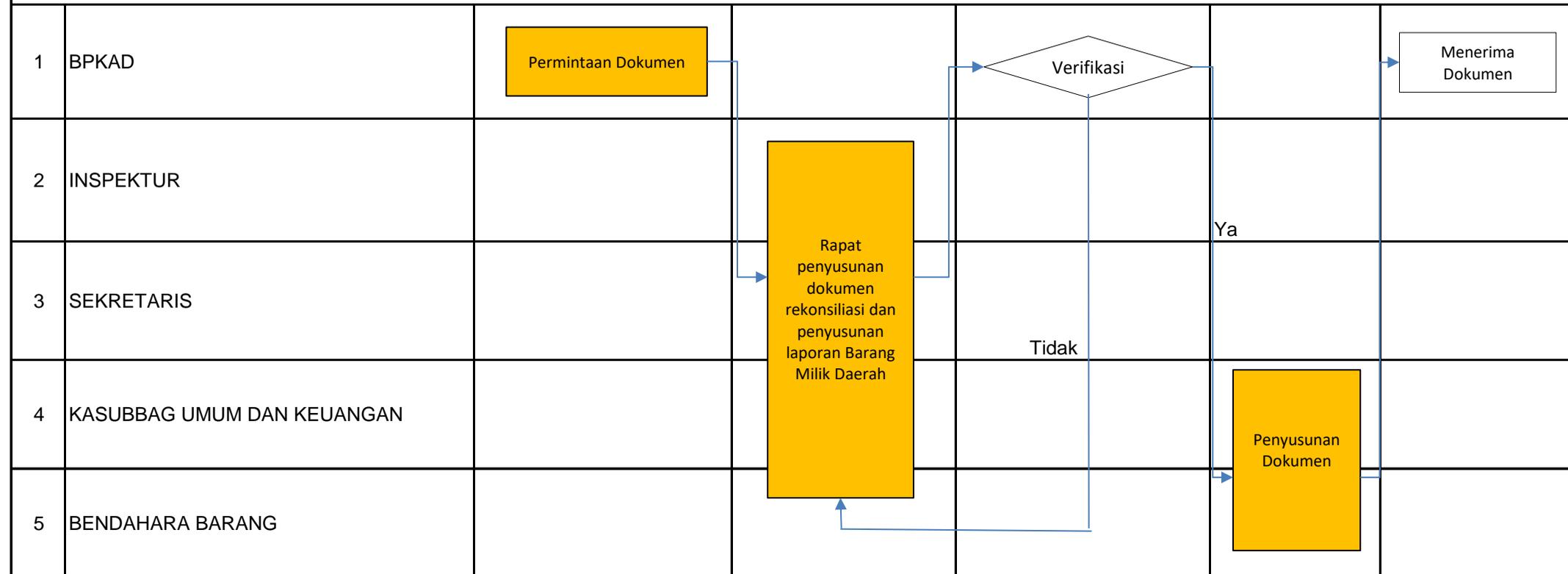
Penatausahaan Barang Milik Daerah

ITDA : 01.27



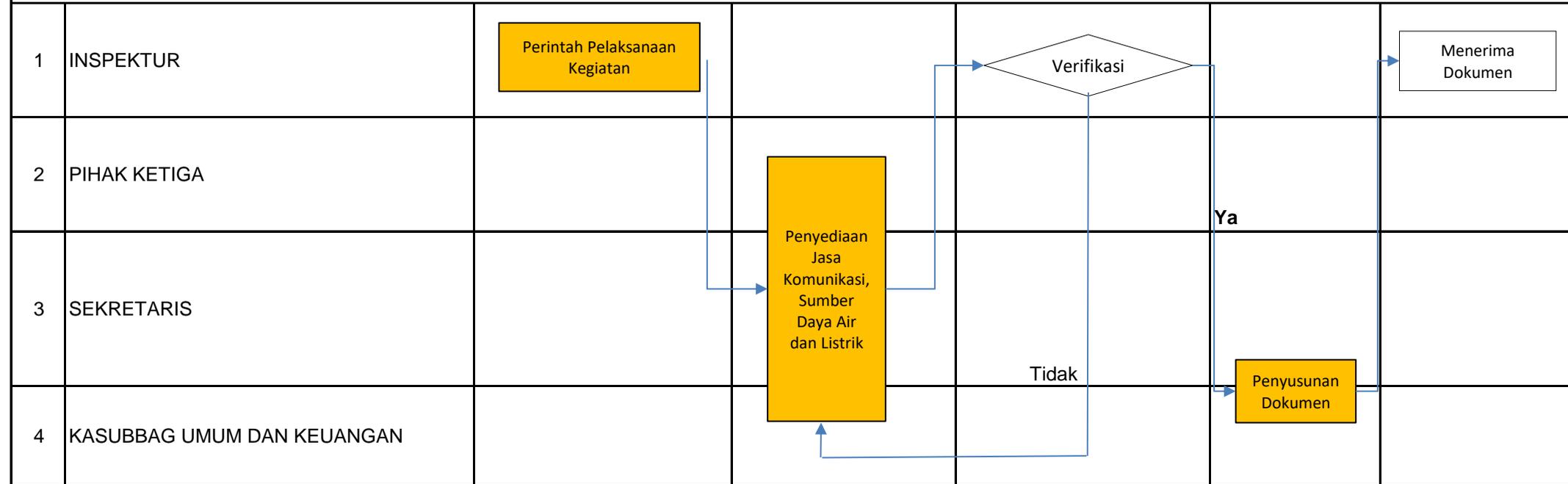
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD

ITDA : 01.28



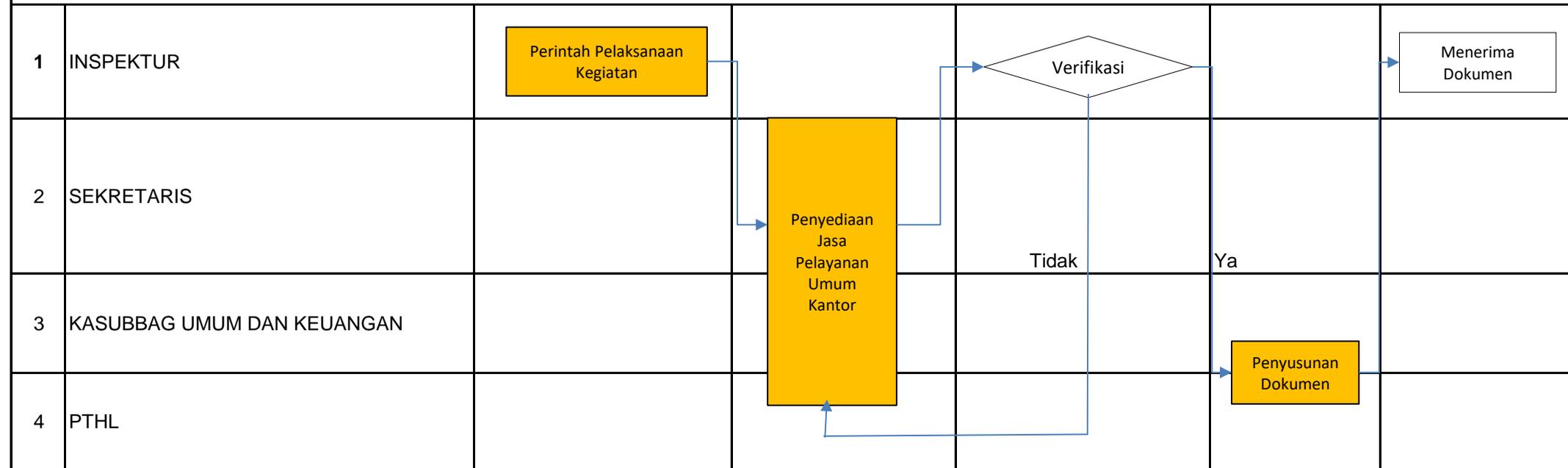
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ITDA : 01.29



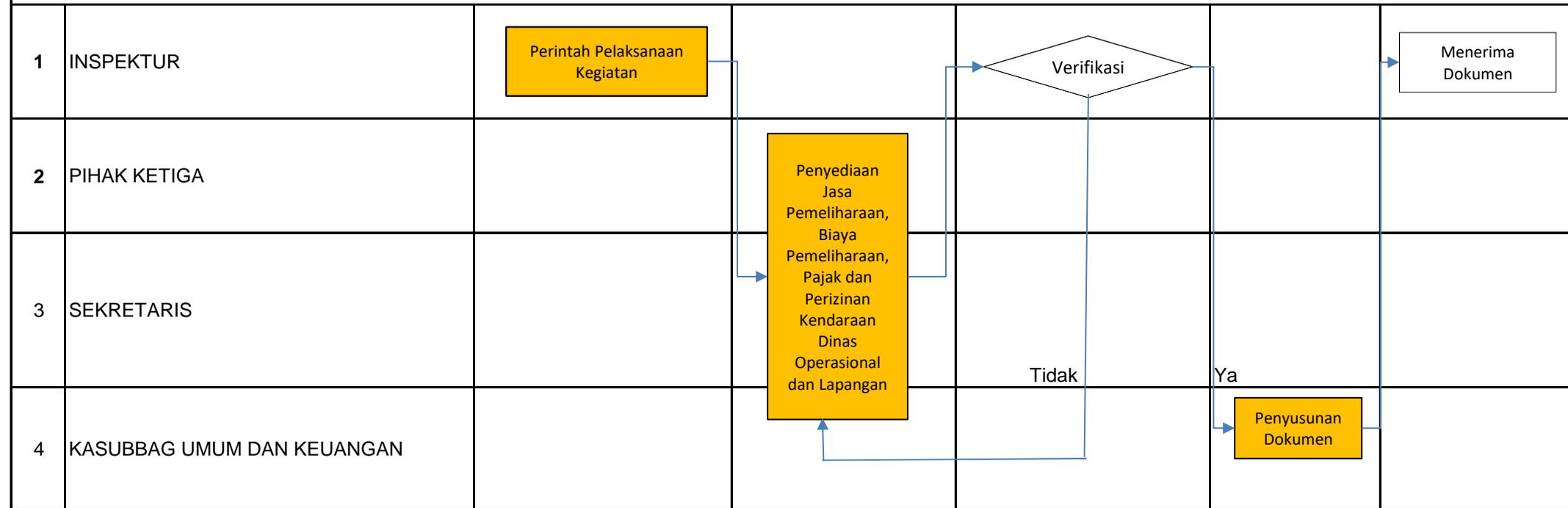
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

ITDA : 01.30



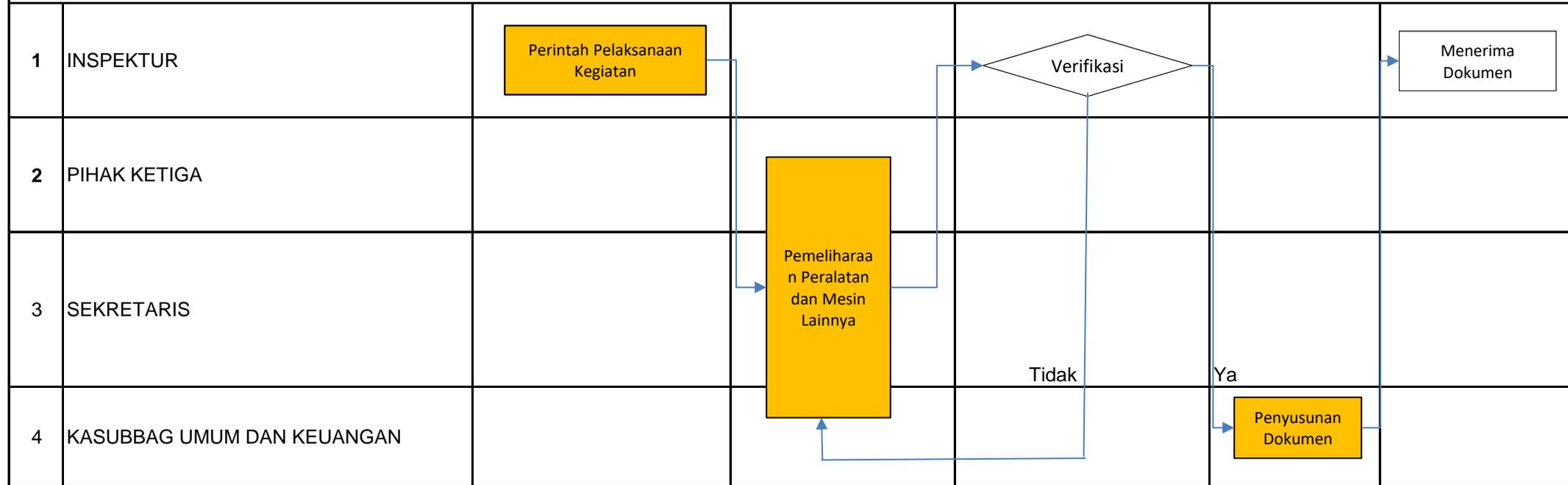
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

ITDA : 01.31



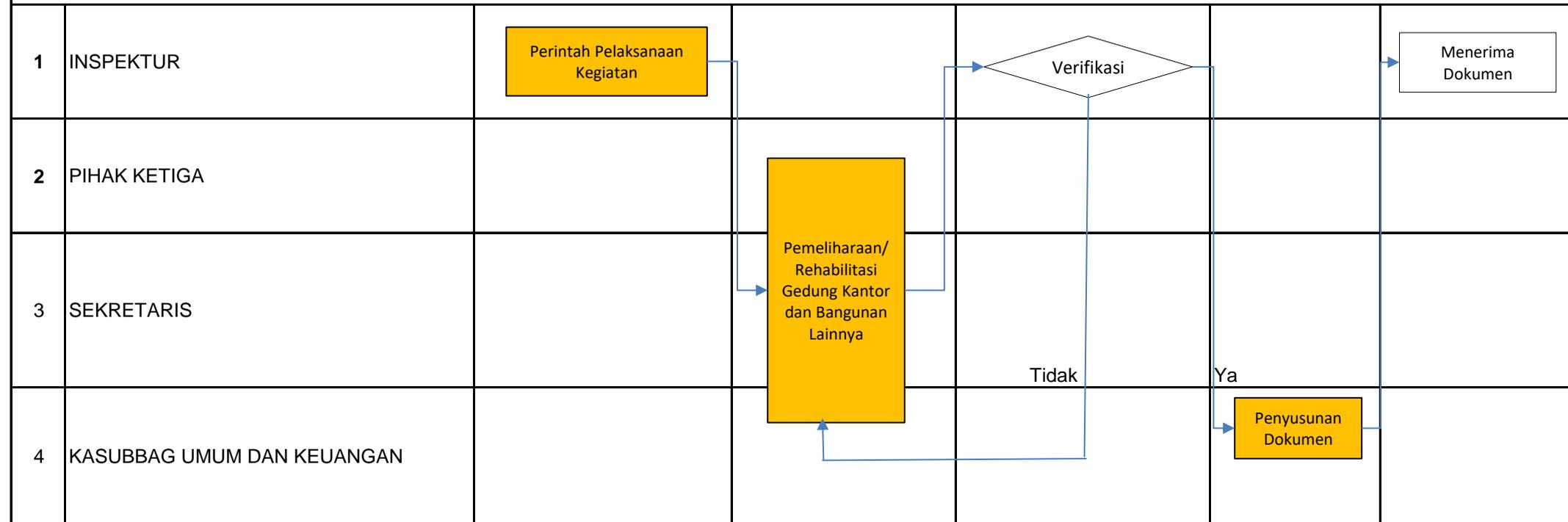
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ITDA : 01.32



Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

ITDA : 01.33



TERIMAKASIH

